



Penalaran Moral Menurut Gender dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Mutiara Nurmanita¹

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta, Email: mutiaranurmanita72@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 26-Maret-2020
Disetujui: 30-Maret-2020

Kata Kunci:

Penalaran Moral
Gender
Pembelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan

ABSTRAK

Abstrak: Permasalahan moral yang sering terjadi dikalangan peserta didik disebabkan kurangnya pemahaman tentang makna moral itu sendiri sehingga menyebabkan terjadinya degradasi moral dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang moral peserta didik, cara menganalisis dalam memecahkan setiap masalah yang menyimpang dari moral yang baik, dan cara peserta didik berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang baik di dalam masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari kajian literatur dari berbagai sumber baik Indonesia maupun asing. Setelah data dikumpulkan maka dianalisis dan dikolaborasi dengan hasil penelitian asing untuk dijadikan kesimpulan dari artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang belum mengerti dan memahami konsep serta makna moral yang sebenarnya dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang moral yang baik. Selain itu, peserta didik belum bisa membedakan moral yang baik dan buruk dikarenakan perbedaan gender dari peserta didik dikarenakan proses penalaran yang berbeda. Selanjutnya peserta didik belum mampu mengambil langkah atau solusi dari setiap permasalahan moral yang terjadi. Untuk itu, pentingnya dalam memberikan wawasan kepada peserta didik tentang moral yang baik dan sesuai dengan kaidah masyarakat. Dengan demikian, guna mengatasi persoalan tersebut, maka pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat diupayakan untuk menganalisis penalaran seseorang dalam berperilaku jika dilihat dari gender.

Abstract: The moral issues that often occur among learners are due to lack of understanding of the moral meaning itself that causes moral degradation in the learning of citizenship education. The study aims to provide an understanding of learners moral, how to analyze in solving every problem that deviates from good morals, and the way learners conduct appropriate values in the society. Research using qualitative method by collecting data from literature study from various sources both Indonesian and foreign. Once data is collected, it is analyzed and collaborate with the results of foreign research to be the conclusion of this article. The results show that there are still many learners who do not understand and understand the concept and moral meaning in fact due to lack of knowledge about good moral. In addition, learners are not able to distinguish good and bad morals due to gender differences from learners due to different reasoning processes. Furthermore learners have not been able to take steps or solutions of any moral problems that occur. Therefore, it is important to give learners insight into good moral and in accordance with the rules of society. Thus, in order to overcome these problems, the learning of citizenship education can be sought to analyse the reasoning of one behaviour when viewed from gender.

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mempunyai peranan penting untuk membentuk warga negara yang baik terutama dalam membentuk warga negara yang bermoral sesuai dengan amanat dan tujuan dalam SIKDIKNAS. Tujuan tersebut ditujukan agar setiap warga negara memiliki pemahaman makna atau konsep moral yang baik terutama dalam pembelajaran PKn. Untuk itu diperlukan sebuah upaya dalam dunia pendidikan. Pendidikan di Indonesia memiliki akar, fungsi dan

tujuan yang dirumuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, bahwa Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman [1]. Paparan akar, fungsi dan tujuan dari Pendidikan Nasional mengindikasikan bahwa pendidikan yang dilaksanakan melalui mata pelajaran hendaknya berakar, berfungsi dan bertujuan dimensi-dimensi moral, nilai, karakter dan akhlak mulia. Secara konsep bahwasanya pembelajaran PKn dan pembelajaran agama tidak dapat

dipisahkan sehingga menjadi keseimbangan dalam pembentukan moral peserta didik di sekolah. Pembentukan moral yang tidak hanya tentang pengetahuan moral, tetapi cara bersikap dan bertindak dengan aturan yang baik, terutama dalam mengajarkan pembelajaran PKn di sekolah [2].

Pendidikan kewarganegaraan paradigma baru berorientasi pada terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*), dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan, agar mampu berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis [3]. Dimensi moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan dari materi kurikulum formal Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Kajian sosial pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bidang keilmuan yang bersifat multidimensional, hal ini ditinjau dari tinjauan pedagogik, menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan meliputi program kurikuler dan aktivitas sosial kultural [4].

Hal ini telah dikemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan perlu membawa formasi karakter dan moral. Untuk menghadapi konflik kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai, maka dibutuhkan kemampuan memberikan argumen moral. Kemampuan memberikan argumen moral ditentukan oleh perkembangan moral. Setiap peserta didik memiliki pemahaman moral yang berbeda-beda sehingga berpengaruh dalam berinteraksi dengan orang lain sehingga cara penyelesaian masalah moral juga berbeda. Penalaran kognitif yang menyinggung terhadap kontrol-diri dan persepsi diri dalam tataran social [5]. Dalam hal ini, penalaran moral sering dikaitkan dengan gender peserta didik yang berbeda-beda. Dilihat dari sisi cara menganalisis dan menyelesaikan masalah moral, peserta didik laki-laki memiliki sikap yang lebih adil dibanding dengan perempuan. Hal tersebut dikarenakan peserta didik laki-laki memiliki tingkat keadilan dan kepedulian yang lebih terhadap permasalahan moral.

Masalah moral merupakan salah satu aspek penting yang perlu di tumbuh kembangkan dalam diri anak [6]. Dalam menghadapi masalah moral yang terjadi di masyarakat, maka kebiasaan konvensional yang berlaku di masyarakat, terutama orang tua demikian juga guru di sekolah adalah dengan memberikan contoh atau nasehat tentang moral yang baik dan moral yang buruk, maupun dengan cara memberikan ganjaran, jika moral yang baik dipatuhi, dan menghukum, kalau moral yang buruk dilanggar. Namun demikian cara memberi contoh, menasehati, memberi hadiah dan memberi hukuman adalah tidak efektif untuk menghasilkan tingkah laku moral yang dikehendaki. Salah satunya adalah model pembelajaran kognitif moral yang menyajikan kasus "dilema moral". Dalam hal ini, pembelajaran PKn memiliki aspek yang mampu memberikan fasilitator kepada peserta didik dalam menyelesaikan setiap

masalah moral. Dalam *paper position* ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menganalisis suatu kebijakan yang berkaitan dengan penelitian tentang perkembangan moral perspektif moral warga negara dalam pembelajaran PKn. Perlunya perhatian dalam menyikapi setiap masalah moral dilihat dari sudut peserta didik dalam memberikan eksistensi pembelajaran PKn di kehidupan sehari-hari.

Dari beberapa permasalahan yang terjadi dalam penalaran peserta didik, mulai dari pemahaman tentang moral, fungsi moral dan peran peserta didik dalam menanggapi dan menganalisis kasus-kasus yang terjadi di sekitarnya. Untuk itu, perlu adanya kesiapan dari beberapa elemen sekolah baik itu peserta didik dan guru melainkan semua bagian penting di sekolah. Maka, dalam *paper position*, peneliti melakukan penelitian lebih mendalam dengan tujuan agar moral pada peserta didik tidak hanya sekedar pemahaman, akan tetapi perlu dikaji dan dianalisis lebih jauh terkait dengan cara peserta didik dalam menganalisis dan memecahkan setiap permasalahan yang berkaitan dengan krisis moral.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana bertujuan untuk mendeskripsikan hasil dari objek yang diteliti. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis berbagai permasalahan degradasi moral yang terjadi di masyarakat berdasarkan penalaran moral menurut gendernya. Selanjutnya sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu peserta didik yang memiliki gender berbeda untuk dijadikan subjek penelitian. Selain itu, ada data sekunder yang mana menggunakan informan diluar dari penelitian yang ada sebagai sumber data pendukung.

Dalam hal ini, metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data observasi dan wawancara. Data observasi bertujuan untuk mendeskripsikan cara penalaran moral peserta didik dalam menghadapi berbagai permasalahan moral yang ada di masyarakat. Penalaran moral peserta didik dibuat berdasarkan gendernya dikarenakan untuk melihat sudut pandang dalam memberikan solusi terhadap masalah moral. Selanjutnya, data wawancara ditujukan untuk melihat hasil dari keserasian antara observasi dan wawancara dalam melihat pemahaman analisis peserta didik terhadap masalah moral yang terjadi.

Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan teknik analisis data yang terdiri dari mereduksi data. Reduksi data artinya memilih data-data yang perlu dilengkapi jika belum semua terpenuhi dan menyaring data yang sesuai dengan penelitian. Selanjutnya, data yang direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskripsi atau kerangka konsep terkait dengan data yang

diperoleh di lapangan [7]. Analisis data terakhir yaitu ditarik kesimpulan terhadap data yang telah dibuat dan dianalisis untuk dimuat dari kesimpulan awal sampai kesimpulan akhir.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Moral, Moralitas dan Urgensinya untuk PKn

Moral berasal dari bahasa latin, yaitu kata *mos*, (adat istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, kelakuan), *mores* (adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, cara hidup). Misalnya dinyatakan bahwa perbuatan si A tidak bermoral, artinya dapat dianggap bahwa si A melanggar nilai dan norma yang di masyarakat. Moral sering diistilahkan sebagai tingkah laku, adat atau kebiasaan seseorang. Selanjutnya, ada istilah moralitas yang berarti berujuk pada kata esensial dari moral itu sendiri [8]. Pada hakekatnya, moral dijadikan sebagai bentuk penyelesaian setiap permasalahan moral yang ada di masyarakat [9].

Dalam hal penjabaran tersebut, maka moral dibedakan menjadi dua yaitu, pertama, seseorang dapat dikatakan bermoral bila mengikuti kaidah dan peraturan yang ada dan sesuai dan kedua, seseorang yang tidak bermoral adalah seseorang yang telah menyimpang dari kaidah yang ada. Moral identik dengan perilaku atau cara bertindak seseorang dalam menyikapi masalah moral. Tingkah laku tersebut di nilai apakah baik atau pun buruk, apakah benar ataupun salah untuk di lakukan maka nantinya adanya pertimbangan moral yang menjadi landasan seseorang. Kemoralan dari bahasa latin *moralis* dengan cara karakter, perilaku yang tepat adalah perbedaan niat baik, keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan antara orang-orang yang terkenal sebagai tepat dan orang-orang yang tidak patut. moralitas yang dapat menjadi tubuh atau standar prinsip-prinsip berasal dari tata tertib yang dari filosofi tertentu, agama, atau budaya, atau ia dapat berasal dari sebuah standar yang orang percaya harus universal. Moralitas juga mungkin khususnya yang identik dengan "kebaikan" atau "mengetahui adanya". Inti dari moralitas dan pengembangan moral adalah deontological, hal tersebut merupakan masalah hak-hak dan resep atau tugas [10]. Bentuk penghakiman moral dewasa ini dikaitkan dengan asumsi bahwa inti dari moralitas adalah keadilan atau prinsip-prinsip keadilan. Keadilan diperoleh secara langsung dari Piaget dari studi sendiri pengembangan penghakiman moral dan membuat pertimbangan.

Moralitas berkaitan dengan pertimbangan segala sesuatu dengan memperhatikan konsekuensinya pada orang lain atau komunitas [11]. Norma sosial, yang secara konvensional keyakinan dan sentimen yang tua mengajar untuk siswi kelas dua SMA [12]. Moralitas sebagai diungkapkan oleh norma-norma sosial dianggap

menjadi "sosial ekstra" dan "sosial" karena menjalin hubungan sosial bersama-sama, dan moralitas karena telah belajar dalam kehidupan sosial, atau dianugerahkan kepada generasi berikutnya. PKn sebaiknya menempatkan moralitas secara jelas sebagai suatu topik dan karena moralitas adalah pandangan-pandangan berkompetisi bahwa moralitas adalah persoalan dari pilihan pribadi, yang Tuhan berikan, moralitas juga adalah konvensi sosial, dan karena itu, moralitas harus didiskusikan. Sebagai hasil, mayoritas dari peserta didik lulusan sekolah tanpa menerima pelajaran dalam penalaran moral atau dalam mata pelajaran yang dibutuhkan untuk menyiapkan mereka sebagai warga negara yang banyak mengetahui dalam demokrasi.

2. Perkembangan Penalaran Moral Kohlberg

Sedikit yang berdebat tentang fakta bahwa Kohlberg, hingga kematiannya pada tahun 1987, telah memainkan peranan penting dalam pengembangan moral. Penelitian Kohlberg, sementara tidak semestinya yang meliputi seluruh elemen-elemen moralitas, telah menikmati pendidikan lebar menarik karena kesejajarannya dengan kerangka kerja perkembangan-kognitif. Dalam kebenaran, Kohlberg tidak pernah ditujukan untuk mencari sebuah grand-teori unified moralitas modal dengan 'M' tetapi untuk sekedar mengenali sebuah "rekonstruksi ontogenesis rasional" dalam menghubungkan individu' olahan semula keadilan ke terbentang dari operasi Piagetian [10]. Alasan dan masuk akal penilaian moral, dibuat dalam konteks kebebasan, otonomi, individu dan sosial pemerintahan sendiri (dengan prinsip satu orang satu suara) adalah inti untuk Kohlberg perkembangan moral dan pembelajaran moral [13]. Prinsip-prinsip moral menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme yang unik untuk berurusan dengan usul moral [14]. Jika demikian, sadar pertimbangan tentang proposisi moral harus bergantung pada proses yang sama yang mendasari pertimbangan apapun.

Penting di sini adalah bahwa perilaku moral individu dapat benar-benar apa yang berlawanan/katanya dan pertimbangannya. Pada intinya, keniscayaan kompatibilitas antara kecerdasan individu dengan tingkat perilaku moral. Hal penting kedua adalah bahwa dalam kajian pengembangan moral, bukannya memusatkan perhatian pada pertimbangan moral, hati nurani dan perilaku moral harus menekankan. Walaupun Kohlberg dan teori-teori Piaget akan sangat berguna untuk memahami pemikiran moral development, mereka tidak memberikan pengakuan yang nyata dari orang yang fungsi moral. Satu-satunya manfaat praktis teori ini adalah bahwa ketika kita melihat bahwa tidak bermoral, rasionalitas adalah sebagai pengecualian karena alasan masuk akal yang

salah, kita dapat membantu dia untuk mengubah cara berpikirnya dan dalam cara ini mengubah perilaku moralnya. Titik yang ketiga adalah bahwa dalam banyak kasus, individu pertimbangan moral adalah perisai untuk perilaku. Dengan kata lain, sebuah pemikiran jenis tertentu dapat sebuah mekanisme pertahanan untuk membenaran. Misalnya, ketika kita lihat bahwa manajer memiliki kecerdasan sebagian besar, kebanyakan pendidikan, dan peringkat tertinggi dalam masyarakat alasan secara moral dalam post-tahap moral konvensional tetapi bertindak dengan moralitas terendah dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menyimpulkan bahwa pada salah satu bagian dari masalah (bermakna hubungan antara pertimbangan moral dan perilaku moral) tidak akan dapat menjelaskan hal pengembangan moral secara ilmiah. Orang-orang yang jelas semua tahu apa yang betul dan apa yang benar; tetapi studi psikologis tentang tahap pembangunan dari pertimbangan moral dalam individu-individu ini tidak akan membantu dalam memahami psikologi pengembangan moral. Dalam evaluasi hubungan antara pemikiran moral dan perilaku moral perhatian penuh harus membayar untuk kuasa pembinasaaan justifikasi rasional dan mekanisme pertahanan lain yang digunakan oleh individu-individu yang dalam untuk menjalankan dari self cela merujuk ke realitas dan menyembunyikan masalah mereka sendiri dalam menyatakan mereka karena sosial dan keadaan lainnya. Titik keempat adalah tentang sikap keberpihakan tersedia dalam Piaget budaya dan teori-teori Kohlberg pengembangan moral yang penelitian baru-baru ini oleh Western psikolog menjelaskan [15].

Isu tentang bagaimana orang mengembangkan pengetahuan dan pertimbangan moral masih merupakan hal yang penting dari literatur psikologi baik teoritis maupun empiris. Perkembangan moral berkaitan dengan pertumbuhan dari pada seluruh pemikiran, nilai dan emosi yang berpengaruh kuat terhadap perilaku dalam situasi-situasi etis. Teori Kohlberg mengusulkan bahwa individu-individu mempunyai keterampilan-ketrampilan kognitif yang mampu mengidentifikasi, dan digunakan untuk memecahkan dilema-dilema etis. Keterampilan-keterampilan itu, ditentukan oleh alasan-alasan yang diberikan tentang bagaimana tindakan-tindakan tertentu yang dirasa hanya secara moral atau lebih disukai. Alasan-alasan yang digunakan oleh Kohlberg untuk memberikan kontinum hierarkis dalam perkembangan moral. Tahapan tersebut secara berturut-turut mewakili tingkat lebih tinggi dari penalaran tentang definisi dan bentuk dari benar dan salah.

3. Tahapan Perkembangan Moral

Tingkat pertama dari pemikiran moral adalah yang umumnya terdapat di tingkat sekolah dasar. Dalam tahap pertama di tingkat ini, manusia berkelakuan menurut norma-norma karena mereka diberitahu untuk melakukannya oleh beberapa kuasa (misalnya, orang tua

atau guru). Penurutan ini dipaksa oleh ancaman aplikasi atau hukuman. Tahap kedua di tingkat ini ditandai oleh sebuah melihat bahwa perilaku kanan berarti bertindak dalam satu kepentingan terbaik sendiri. Tingkat kedua pemikiran moral adalah yang umumnya terdapat dalam masyarakat, maka konvensional tahap pertama di tingkat ini (tahap 3) adalah ditandai oleh suatu sikap yang berusaha untuk melakukan apa yang akan memperoleh persetujuan dari orang lain. Tahap kedua adalah salah satu oriented untuk mematuhi hukum dan merespons dengan kewajiban dalam melaksanakan tugas. Tingkat ketiga dari pemikiran moral adalah salah satu yang Kohlberg merasa tidak mencapai oleh mayoritas orang dewasa. Tahap pertama (tahap 5) adalah pemahaman mutualitas sosial dan kepentingan asli dalam kesejahteraan orang lain. Tahap Akhir (tahap 6) adalah berdasarkan rasa hormat terhadap prinsip universal dan tuntutan-tuntutan kesadaran pribadi. Sementara Kohlberg selalu percaya dalam keberadaan tahap 6 dan mempunyai beberapa calon untuk itu, ia tidak akan pernah mendapatkan subyek yang cukup untuk menentukan, apalagi mengamati gerakan longitudinal mereka [16].

Periode pre-conventional (Tahap Moral 1 dan 2) dimulai pada awal kanak-kanak dan diperluas melalui sekolah dasar. Pada tahap Moral 1 dan 2, orang membenarkan tindakan dalam ketentuan menghindari hukuman dan mendapatkan hadiah. Pada tahap ini, orang-orang tertentu ("diri" atau "orang tua saya") yang melakukan hal-hal tertentu ("Jika saya tidak berpegang pada janji-janji, maka orang tua saya tidak percaya lagi aku"). Dewasa umumnya menganggap pertimbangan moral dari masa ini tidak memadai. Periode konvensional (Tahap Moral 3 dan 4) bermula di sekolah dasar dan meluas di seluruh pendidikan. Periode ini menghasilkan norma-norma konvensional dewasa. Alasan di setiap tahap periode ini berisi logika yang cukup. Pada tahap Moral 3, tahap Grup, tindakan yang dibenarkan dalam ketentuan reputasi dan karakterisasi grup atau individu yang terlibat. Kelompok-kelompok dan orang dapat, misalnya, baik atau buruk. Tindakan yang sering dihakimi pada dasar grup atau individu atau motif. Pada tahap Moral 3/4, tahap birokrasi, alasan-alasan yang diberikan untuk labeling sebuah tindakan sebagai adil dan baik dan logis abstrak. Norma-norma birokrasi, undang-undang, peraturan, dan panduan peraturan dan perilaku dilihat sebagai "diberikan"; mereka tidak dapat diubah agar sesuai dengan situasi tertentu atau kebutuhan masing-masing. Peran dan orang tidak lagi keliru mereka pada tahap sebelumnya.

Pada tahap Moral 4, tahap Kelembagaan, untuk mengevaluasi moralitas tindakan adalah pemeliharaan (atau kemusnahan) suatu sistem--atau masyarakat. Norma-norma hukum, peraturan dan peraturan-peraturan sekarang membentuk sistem secara logik. Hukum masyarakat adalah dilihat sebagai cara yang

bermanfaat untuk mengatur hak atau tugas-tugas individu atau kelompok. Orang pada tahap ini akal dalam hal bagaimana tindakan yang akan mempengaruhi peran masing-masing dan sistem dalam status, atau bagaimana ia akan mempengaruhi kemampuan sistem yang berfungsi. Dengan itu, terdapat ketegangan antara hak-hak pribadi dan masyarakat, dan antara tugas-tugas pribadi dan masyarakat. Individu yang mengalami ketegangan, misalnya, dalam konflik antara kemerdekaan dari dan ketergantungan pada kedua orang lain dan sistem. Kebanyakan orang pada tahap ini menerima subordinasi mereka ke sistem kemasyarakatan. "Apa yang akan terjadi kepada masyarakat jika setiap orang...?" adalah sebuah pertanyaan karakteristik tahap ini. Sebuah minoritas individu menolak sistem dan benar-benar dan menekankan kemerdekaan individu. Dalam periode postconventional (Tahap Moral 5 dan 6) bermula beberapa ketika selepas masa remaja; walau demikian, pemikiran postconventional sepenuhnya dan tindakan muncul hanya setelah awal usia dewasa. Beberapa falsafah menggunakan argumen postconventional kontemporer. Kenyataannya, perdebatan falsafah dalam ketentuan versus argumen postconventional. Dalam setiap masyarakat diketahui, hanya sebagian kecil dari anggota mencapai tahap-tahap postconventional alasan yang jelas.

Pada tahap Moral 5, tahap Universal, prinsip-prinsip abstrak universal membentuk dasar dari tindakan politik dan moral. Mereka muncul dari gagasan-gagasan universal dan martabat hak-hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini telah articulated oleh anggota dari sejumlah masyarakat modern. Mereka telah menemukan ekspresi menghormati mereka dalam karya-karya keilmuan, politik, dan pemikir agama. Misalnya, teori keadilan mengemukakan bahwa tindakan-tindakan tidak memperburuk situasi kurangnya advantaged. Tahap 5 prinsip-prinsip moral tersebut universal dan umum dalam aplikasi mereka, terlepas dari orang-orang tertentu terpengaruh. Pada tahap ini, masyarakat adalah dipandang pertama sebagai penciptaan individu dan kedua sebagai lingkungan di mana orang mengembangkan. Penekanan pada saling ketergantungan antara individu dan masyarakat merekonsiliasi kedudukan pergantungan dan kedudukan kemerdekaan terkait dari tahap sebelumnya. Tahap 5 prinsip-prinsip moral tidak hanya melayani kepentingan individu tetapi juga bahwa masyarakat. Dari sebuah perspektif-tahap perkembangan, prinsip-prinsip mengkoordinasikan hak-hak dan tugas-tugas individu dengan orang-orang dari masyarakat. Cara-cara pembuatan keputusan adalah proses karena mulai dari lotere untuk voting, dengan preferensi untuk membuat keputusan bersama. Keputusan yang tidak konvensional mungkin akan disekat selama mereka muncul masuk akal dalam terang prinsip-prinsip yang lebih tinggi [17].

Pengembangan moral tentang "hak" misalnya, orang-orang hidup dan kebebasan-perdebatan di seberang, bahkan jika mayoritas masyarakat yang diselenggarakan sebaliknya. Pada paruh kedua tahap postconventional, Kohlberg ditemukan, telah ditandai oleh individu penerapan prinsip-prinsip etika universal yang dipandu pilihan individu bahkan jika melanggar undang-undang [18]. Orang-orang pada tahap ini telah internalized pembangunan prinsip-prinsip seperti itu dan mereka diterapkan mereka. Seperti yang dicatatkan di atas, teori perkembangan kognitif mengusulkan sebuah setel tahapan dalam pengembangan pertimbangan moral, mulai dari "pre-moral" dan mungkin konvensional melalui "postconventional" [19]. Dewey berpendapat tiga tahap-tahap pengembangan moral: (1) pre-moral atau tingkat pre-conventional "perilaku termotivasi oleh dan biologi impuls sosial dengan hasil untuk akhlak," (2) conventional perilaku tingkat "di mana masing-masing menerima dengan sedikit reflectioan kritis standar -standar kelompoknya," (3) tingkat otonom dalam perilaku yang "melakukan diberi petunjuk oleh individual berpikir dan menghakimi untuk dirinya sendiri apakah tujuan yang baik dan tidak menerima standart kelompoknya tanpa perenungan." Dewey berpikir sebagaimana yang tentang tahap moral adalah bersifat teoritis [20].

Selanjutnya menurut Piaget, moral peserta didik terdiri atas: (1) fase absolut; anak menghayati peraturan sebagai suatu hal yang dapat diubah, karena berasal dari otoritas yang dihormatinya. Peraturan sebagai moral adalah obyek eksternal yang tidak boleh diubah, (2) fase realitas; anak menyesuaikan diri untuk menghindari penolakan orang lain. Peraturan yang dibuat pada dasarnya menjadi landasan dalam bertingkah laku dan menjadi hal yang disepakati secara bersama-sama, dan (3) fase subyektif; anak memperhatikan motif/kesengajaan dalam penilaian perilaku [21].

D. TEMUAN ATAU DISKUSI

Gender merupakan permasalahan yang urgen di dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Gender seorang dapat berpengaruh dalam hal berbicara dan perilaku maupun bentuknya. Perspektif gender mengutamakan adanya kesamaan kondisi dan situasi bagi perempuan dan pria agar bisa mendapatkan kesamaan peran dalam setiap bidang tanpa pengecualian. Definisi tradisional mengenai gender menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat [10]. Gender seseorang dapat mempengaruhi seseorang dalam menerima suatu pembelajaran terutama yang berkaitan dengan pembelajaran moral yang ada di dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan menjadi penting karena mengandung unsur-unsur moral. Sehingga dalam pembelajaran ini diperlukan pendidikan moral agar dapat dijadikan pedoman dalam perbedaan gender seseorang. Melalui pembelajaran PKn diharapkan agar peserta didik dapat menjadi sarana dalam mengkomunikasikan cara penalaran moral yang baik [2]. Adanya Pendekatan

pendidikan nilai moral ini masih jarang digunakan oleh para guru dalam pengajaran PKn. Pendidikan PKn pada hakikatnya adalah proses membinakan nilai-nilai kepada setiap individu generasi penerus bangsa. Pendekatan ini bertujuan untuk dijadikan pedoman, rujukan bagi penelitian lain yang sesuai dengan perkembangan masa kini. Pada pengajarannya nilai dikembangkan untuk menstimulasi dan mengeksplorasi hal-hal yang telah ada di masa lalu, masa kini dan hal-hal yang akan datang tentang kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan IPTEK [22].

E. SIMPULAN DAN SARAN

Dari penjabaran *paper position* yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa moral merupakan hal yang penting dalam membentuk warga negara yang baik sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 yang pada intinya juga menjadi acuan dan pedoman dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bermuatan nilai-nilai moral. Moral berkaitan dengan baik buruknya tingkah laku atau perbuatan seseorang. Seseorang yang dikatakan bermoral jika mengikuti dan mematuhi peraturan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Tidak dapat dipungkiri seseorang yang tidak bermoral dapat dikatakan sudah menyimpang dalam kaidah arti moral tersebut. Proses pembelajaran tentu saja berpengaruh dalam perbedaan gender seseorang, seorang yang laki-laki tentu saja berbeda dengan perempuan bila dilihat dari bentuk fisiknya namun ketika dikaitkan tingkah laku moral, tentu akan sama. Artinya seseorang yang bergender laki-laki yang melakukan kesalahan maka akan sama dengan seorang perempuan yang melakukan kesalahan karena gender bukan berarti berbeda perlakuan namun hukuman yang diberikan akan sama dan dilihat dari kesalahan yang dilakukan seseorang tersebut.

Untuk itu, diperlukan suatu upaya dari berbagai pihak, agar perbedaan gender tidak dijadikan alasan untuk membentuk moral seseorang karena yang menjadi permasalahan adalah ketika seseorang tidak menunjukkan sikap moral. Seseorang anak yang melakukan kesalahan maka akan mempertimbangkan kesalahan, namun disarankan diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak untuk bekerja sama dalam menghadapi permasalahan moral yang ada. Salah satunya dengan mensosialisasikan bahwa pentingnya pembelajaran moral terutama dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan karena pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran penting dalam membentuk warga negara yang baik dan bermoral. Selanjutnya diperlukan kesadaran dari seorang pendidik dalam memposisikan anak atau peserta didik agar tidak terjadi penyimpangan moral. Diberikan arahan dan nasehat agar peserta didik yang menjadi penerus bangsa nantinya dapat memimpin bangsa dan negara ini secara bermoral.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [2] Ibda, F. (2012). *Pendidikan moral anak melalui pengajaran bidang studi ppkn dan pendidikan agama*. Fakultas Tarbiyah Iain Ar-Raniry. Jurnal Ilmiah Didaktika Februari (XII), 2: 338-347.
- [3] Muchson. (2006). *Dimensi Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan*. Jurusan Hukum dan Kewargaan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- [4] Sutrisno. (2016). *Berbagai pendekatan dalam pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan*. Dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran, (5).
- [5] Santrock, J. W. (2007). *Perkembangan anak*. Jakarta: Erlangga.
- [6] Dwiyanti, R. (2013). *Peran orang tua dalam perkembangan moral anak (kajian teori kohlberg)*. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Prosiding Seminar Nasional Parenting.
- [7] Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- [8] Sjarkawi. (2011). *Pembentukan kepribadian anak*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [9] Azizah, N. (2015). *Perilaku moral dan religiusitas siswa berlatar belakang pendidikan umum dan agama*. Sekolah Pascasarjana Program Studi Psikologi Universitas Gadjah Mada. Jurnal Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, (33), 2: 1 – 16.
- [10] Zeidler, D. L. (2003). *The role of moral reasoning on socioscientific issues and discourse in science education*. University of South Florida. London: Kluwer Academic Publishers. Vol. 19.
- [11] Mayasari, I, dkk. (2012). *Penerapan nilai integritas dan perspektif gender dalam perilaku beretika*. Management Study Program Faculty of Economics and Business. Universitas Paramadina Jakarta. KINERJA, (16), 2: 153-179.
- [12] Sykes, Karen. (2009). *Ethnographies of moral reasoning. living paradoxes of a global age*. United States: Palgrave Macmillan.
- [13] Zizek, B. D. G., & Ewa N. (2015). *Moral development and citizenship education*. Sense Publishers Rotterdam / Boston / Taipei. Vol. 9.
- [14] Bucciarelli, M. (2008) . *The psychology of moral reasoning*. Centro di Scienza Cognitiva and Dipartimento di Psicologia University of Turin Sangeet Khemlani and P. N. Johnson-Laird Department of Psychology Princeton University. Judgment and Decision Making, (3), 2: 121–139.
- [15] Lotfabadi, H. (2008). *Criticism on moral development theories of piaget, kohlberg, and bandura and providing a new model for research in iranian students' moral development*. Educational Psychology

- of Shahid-Beheshti University. Quarterly Journal of Educational Innovations, No. 24, Spring .
- [16] Barger, R. N. (2000). *A summary of Lawrence Kohlberg's stages of moral development*. Notre Dame: University of Notre Dame.
- [17] Sonnert, M. L. (2000). *Society and the highest stages of moral development*. Department of Physics Department of Psychiatry Harvard University Harvard Medical School.
- [18] Wilkins, L & Renita, C. (2005). *The moral media how journalists reason about ethics*. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers .
- [19] Sunar, D. (2002). *Psychology of morality*. Bogazici University, Turkey. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1).
- [20] Arthur, J., & Davies, I. (2008). *Citizenship education*. British: SAGE Library of Educational Thought and Practitice, Vol, 2 .
- [21] Ahmad Gunadi, A. (2013). *Membentuk karakter melalui pendidikan moral pada anak usia dini di Sekolah Raudhatul Athfal (R.A) Habibillah*. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurnal Ilmiah Widya, 85 (1), 2.
- [22] Djuwita, P. (2009). *Peningkatan kemampuan guru dalam pembelajaran PKn dengan pendekatan pendidikan nilai yang inovatif*. FKIP Universitas Bengkulu. Jurnal Kependidikan Triadik, (12), 1.